

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN OBYEK WISATA ALAM AIR PANAS DAN AIR TERJUN DI DESA MANTIKOLE KECAMATAN DOLO BARAT KABUPATEN SIGI

Rahmah H. Abd. Hay Dg. Materru

Mahasiswa Program Magister Pendidikan IPS Pascasarjana Universitas Tadulako

Abstract

The Reseach problems are (1) How are the roles of the local community in the management of natural tourism object, the spring and the waterfall, (2) How does the local community participate in the management, (3) How are the roles of the local government in the management of the tourism object. The research is qualitatif descriptive. The data were obtained from the observations, interviews, and questioners. The data were analyzed by using data reduction, data presentation, and verification. The research involved 30 local residents near the tourism object and some informants including the local principals, the chairperson, the elders, the youth figures, the parking men, the guards, and the sellers. The result shows that the local community roles in managing the object are not maximum in some aspects such as economy, social, culture, law, and environmental regulation. Their participation is not maximum shown by their jobs in which they work only as the employee. In addition, the local government roles are not maximum because the accommodation and regulation are not well provided. Their roles and their participation in managing the natural tourism object, the spring and the waterfall in Mantikole are not maximum in some aspects such as economy, social, culture, law, and environmental regulation. The local community's participation is limited as workers around the area. The government roles are not maximum in providing some accommodations and regulations in that tourism object.

Keywords: *roles, participation, community, government, management, tourism object*

Kabupaten Sigi memiliki keunikan alam baik ditinjau dari keadaan geografis maupun geologinya. Terdapat banyak pegunungan yang ditumbuhi oleh hutan heterogen, dan hutan yang mengelilingi kawasan kabupaten sigi ini hampir 80% dikategorikan hutan "suaka alam", dimana merupakan tempat berlindungnya fauna dan tempat pembudidayaan flora yang hampir punah, disamping itu berfungsi untuk menyimpan cadangan air dan penyangga tanah longsor. Wilayah ini secara geologi berada pada sesar (patahan) "palu koro" pada segmen Balane, Mantikole Pulu, Palolo dan Pipikoro (Kulawi). Patahan-patahan di wilayah ini secara alamiah mengeluarkan geiser (sumber air panas) dan air terjun yang memiliki keunikan tersendiri. Keunikan wilayah di atas, mendapat campur tangan manusia, sehingga menimbulkan daya tarik dan layak dikategorikan "obyek wisata gejala alam atau fenomena alam".

Salah satu wilayah yang memiliki fenomena alam "keluarnya geiser (sumber mata air panas) dan fenomena air terjun" di Kabupaten Sigi, adalah yang terdapat "di Desa Mantikole" Kecamatan Dolo Barat. Desa ini telah memanfaatkan fenomena alam yang unik tersebut, sebagai obyek wisata alam walaupun penataan sarana dan prasarananya belum memadai. Disamping itu partisipasi masyarakat dalam pengelolaan obyek wisata tersebut masih rendah.

Elemen sumber daya alam seperti pepohonan, udara, hamparan pegunungan, pantai, bentang alam dan sebagainya. Semua elemen diatas merupakan sumber daya yang berguna bagi pariwisata, memuaskan wisatawan dan dapat dikelola oleh masyarakat disekitar lokasi pariwisata untuk memenuhi kebutuhan. Semua itu memerlukan partisipasi dari elemen masyarakat juga, seperti; bagaimana partisipasi pemerintah melalui

dinas yang terkait dengan pariwisata, partisipasi masyarakat ditinjau dari mata pencaharian dan penghasilan, partisipasi masyarakat ditinjau sosial budaya (keragaman etnis) dan partisipasi masyarakat ditinjau dari tingkat pendidikan yang mereka miliki

Hampir semua elemen tersebut dimiliki oleh Kabupaten Sigi yang mempunyai jenis obyek wisata alam yang beragam, kecuali obyek wisata pantai dan sumber daya manusia dalam mengelola obyek wisata yang belum memadai. Hal ini dapat dilihat dari masih minimnya pemahaman masyarakat terhadap arti pariwisata bagi kehidupan khususnya pelestarian lingkungan alam dan perbaikan ekonomi masyarakat. Sampai saat ini apapun yang terjadi dilokasi (obyek) wisata yang berkaitan dengan pengelolaannya, masyarakat menyerahkan penuh tanggung jawab itu kepada pemerintah.

Pariwisata tentunya tak terlepas dengan yang namanya peran masyarakat, karena selain pemerintah, masyarakat pun turut serta andil didalam berkembangnya suatu objek wisata. Menurut Sunaryo (2013:5) proses peningkatan peran serta aktif masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan keterlibatan masyarakat lokal terutama berkaitan dengan identifikasi masalah atau persoalan, identifikasi potensi pengembangan, analisis dan peramalan terhadap kondisi lingkungan dimasa mendatang, pengembangan alternatif rencana dan fasilitas, dan sebagainya.
2. Tahap implementasi bentuk keterlibatan masyarakat terutama terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pengembangan/pembangunan, pengelolaan objek atau usaha yang terkait dengan kegiatan kepariwisataan.
3. Monitoring dan evaluasi bentuk partisipasi masyarakat terwujud dalam peran dan posisi masyarakat pada tahap monitoring/evaluasi serta memperoleh nilai manfaat secara ekonomi maupun sosial budaya, yang berdampak pada peningkatan

kesejahteraan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat lokal

Menurut Pendit (1994:108) Wisata merupakan segala hal dan kejadian yang diatur dan disediakan sehingga dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pariwisata baik berupa suasana, kejadian, benda, maupun jasa. Sedangkan menurut Fandeli (2001:48) Potensi wisata dapat berupa sumber daya alam yang beraneka ragam dari aspek fisik dan hayati, serta kekayaan budaya manusia yang dapat dikembangkan untuk pariwisata. Sedangkan sumberdaya pariwisata diartikan sebagai unsur-unsur lingkungan alam atau yang telah diubah oleh manusia yang dapat memenuhi keinginan wisatawan

Sebagai suatu kesatuan dan bagian-bagian dari sistem yang mempunyai fungsi, masyarakat membuat sistem menjadi seimbang dan melakukan kegiatan tersebut saling berhubungan dalam kelompok dan menjaga keseimbangan seluruh sistem sosial. Sementara pariwisata menyangkut semua aspek kehidupan, maka jelaslah kegiatan ini sangat membutuhkan masyarakat untuk mengatur seluruh aspek kehidupan agar terjadi keseimbangan antara lingkungan sosial budaya dan keseimbangan lingkungan alam. Peran masyarakat dalam pengelolaan obyek wisata memiliki beberapa aspek-aspek di antaranya aspek ekonomi, sosial, budaya, hukum dan geografi.

Pengelolaan objek wisata alam tanpa adanya partisipasi dari masyarakat maka mustahil akan tercapai tujuannya. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan, dan kesadaran dari setiap masyarakat, sehingga objek wisata dapat terpelihara dengan baik dan dapat mempromosikan daerah tersebut merupakan daerah wisata yang perlu di kunjungi.

Menurut Paul (1991:87) "Partisipasi adalah adanya keterlibatan mental dan emosional, keterlibatan secara fisik dalam suatu aktifitas, turut memberikan kontribusi dana, material serta peralatan dan lain-lainnya yang berguna untuk mencapai suatu tujuan". Sedangkan Coralie Bryant dan Louise G.

White dalam Hadinoto (1996:7) memandang partisipasi atau peran serta masyarakat sebagai kemampuan dalam proses pembangunan. Dikatakan bahwa peran serta merupakan sikap keterbukaan terhadap partisipasi dan peran pihak lain. peran serta berarti perhatian mendalam terhadap perbedaan dan perubahan yang akan dihasilkan suatu proyek sehubungan dengan kehidupan masyarakat. Peran serta adalah kontribusi yang dapat oleh pihak lain lakukan untuk suatu kegiatan. Tjokroamidjojo (1995: 48) Partisipasi dapat dilakukan dalam beberapa dimensi, yaitu; (1) Sumbangan pikiran (ide atau gagasan). (2) Sumbangan materi (dana, barang dan alat). (3) Sumbangan tenaga (berkerja atau memberi kerja). (4) Memanfaatkan atau melaksanakan pelayanan .

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat (Pasal 1, ayat (8), dinyatakan bahwa “pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.”

Menurut Sunaryo (2013:81) bahwa pemahaman mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) harus mengacu pada pemahaman bahwa bukan hanya apa yang dilakukan oleh lembaga pemerintah saja yang harus baik, akan tetapi keseluruhan stakeholders atau para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan urusan yang terkait dengan masalah dan kepentingan publik harus juga mempunyai kapasitas yang memadai. Disini diharapkan adanya kerjasama yang baik dari berbagai pihak yang terkait tidak terkecuali kerjasama dari masyarakat lokal. Menurut Sunaryo (2013:88), menyebutkan konstruksi strategi *Public-Private Partnership* (PPP) atau kemitraan pemerintah-swasta dalam proses pembangunan kepariwisataan sebagai berikut salah satu cara yang sangat strategis dalam penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik, yang

dalam hal ini pihak pemerintah tetap bertanggung jawab dan harus akuntabel bagi penyediaan jasa publik dan tetap menjaga kelangsungan kepentingan publik. PPP adalah salah satu cara yang sangat efektif dalam menggerakkan roda perekonomian, dalam PPP diharapkan semua pihak (pemerintah, masyarakat dan swasta) menjalin kerjasama yang solid, adil dan transparan.

METODE

Menurut Sugiyono (2005:166) memperoleh data yang akurat di lapangan, di perlukan berbagai macam teknik pengumpulan yang relevan dengan tujuan penelitian. Penelitian ini kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan angket. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, verifikasi. Subyek penelitian yaitu masyarakat biasa berjumlah 30 orang dan yang menjadi informan yaitu Camat, Kepala Desa, Ketua Destinasi, Ketua Adat, Ketua PKK, Toko Pemuda, Tukang Parkir, Penjaga Pintu Masuk, dan Pedagang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Mantikole Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi dipusatkan pada wisata alam air panas dan air terjun di Desa Mantikole. Luas obyek wisata di desa Mantikole yang terdiri dari; luas wisata alam air panas dikaki pegunungan Rio Pakava 3 ha, sedangkan luas obyek wisata air terjun 7 ha. Kedua obyek wisata ini dihubungkan oleh jalan setapak sepanjang kurang lebih 500 m, ditempuh dengan berjalan kaki dan kendaraan roda dua.

Desa Mantikole merupakan pecahan dari desa Bobo pegunungan. Menurut penuturan Kepala desa yang sekarang menjabat (Rasyit) ,bahwa nama Mantikole diambil dari pemberian nama dari kayu yang terpotong-potong kemudian dibakar menjadi abu,

peristiwa kayu yang demikian itu disebut “Mantikole”.

2. Peran Masyarakat dalam Mengelola Wisata Alam Air Panas dan Air Terjun

Peran masyarakat dalam mengelola wisata alam di desa Mantikole melalui, beberapa aspek yang diharapkan berjalan dengan baik seperti pengelolaan melalui parkir kendaraan, penjaga pintu masuk, penjual

makanan dan minuman, atraksi dan rumah inap yang disediakan oleh masyarakat maupun pemerintah. Jadi kemampuan peran masyarakat dalam mengelola wisata alam air panas dan air terjun di desa Mantikole melalui beberapa aspek cukup baik ini terlihat dari peran masyarakat setempat yang menjadi pekerja dalam area wisata, ini dapat dilihat pada tabel wawancara dibawah sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Wawancara Masyarakat di Area Wisata Mantikole

No	Aspek	Pernyataan	Penjaga Parkir	Penjaga Pintu Masuk	Pedagang
1.	Ekonomi	1. peran masyarakat dalam berpartisipasi mengelola wisata melalui aspek ekonom	- menyediakan lahan parkir	- Mengenakan tarip kepengujung	- Menjual makanan dan minuman
		2. jumlah pendapatan yang diperoleh perminggu dari hasil pengelolaan wisata	- 250.000 - Tergantung dari pengunjung	- 300.000 - Melihat dari banyaknya pengunjung	- 150.000 - Perhari
		3. Berapa KK yang melakukan kegiatan berdagang di areal wisata	- 30 KK	- 30 KK	- 30 KK
		4. Pedangan membayar retribusi	- Belum	- Belum	- Belum
		5. Mengapa pedagang belum membayar retribusi	- Belum di sedikan karcis retribusi	- Belum di anjurkan oleh pemerintah	- Belum ada petugas penungut retribusi
		6. Ada produk wisata yang lain yang merupakan tambahan di areal wisata	- Kolam renang - Anak-anak - Dewasa	- Penginapan - Masih sedang di perbaiki	- Tidak tau
2.	Sosial	1. pengaruh positif maupun negatif dari hasil interaksi masyarakat sebagai pengunjung, dengan masyarakat sebagai tuan rumah (host)	Positifnya - jadi lancar menggunakan bahasa indonesia - mengenal teknologi dan telekomunikasi - cara berpakaian yang baik - bersikap ramah kepada sesame Negatifnya: - dipengaruhi gaya hidup pengunjung seperti suka behura-hura - Banyak pemuda mengikuti penampilan pengunjung	Positifnya - Mengetahui kehidupan masyarakat kota yang baik - Cepat beradaptasi dengan masyarakat lokal - Mengetahui mengelola wisata dengan baik Negatifnya - Lupa waktu, kadang-kadang lupa sholat - Perilaku yang ditampilkan betentangan dengan adat istiadat.	Positifnya - Mengenal lebih banyak jenis makanan - Mementingkan kebersihan - Mengetahui makanan yang di sukai pegunjung. Negatifnya - Kurang berinteraksi dengan masyarakat desa
3.	Budaya	1. Peran masyarakat dalam menonjolkan budaya yang merupakan kearifan lokal seperti; movunja, moraego, motaro atau dengan permainan anak-anak seperti mogasi, motilako, mobanga dan lain-lain, apakah sudah pernah ditampilkan sebagai atraksi budaya	- Belum di musyawarakan dengan took masyarakat	- Belum diprogramkan oleh pemerintah daerah	- Tidak tau
		2. perlu dipentaskan budaya lokal di atas di areal wisata	- perlu	- sangat perlu	- Perlu - Menambah minat pengunjung
		3. tujuan dipentaskan budaya kearifan lokal dipentaskan di areal wisata	- agar di kenal masyarakat luas	- menambah pendapatan pariwisata	- Menambah destinasi wisata

4.	Hukum	pengelolaan wisata alam Mantikole ini telah dikelola berdasarkan UU RI No 10 Th 2009 atau aturan Pemda Sigi atau aturan Pemerintah desa	- Belum mengetahui cara mengelola menurut UU	- Sebatas himbaun dari pemerintah desa	- Tidak tahu,
5.	Geografi	1. penataan areal wisata sekarang menurut pengamatan kalian sudah tertata dengan baik	- Belum tertata dengan baik - Terutama tempat parkir	- Belum teratur, penataan wisata	- Penataannya masih kacau
		2. perlunya areal ini ditata dengan baik	- Iya, supaya pengunjung tidak bosan	- Iya, supaya semakin banyak pengunjung	- Iya, supaya semakin bagus

3. Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Objek Wisata Alam

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan objek wisata air panas dan air terjun di Desa Mantikole hanya sebagai pekerja dalam area wisata air panas dan air terjun. Sedangkan bentuk partisipasi yang

lakukan oleh pemerintah berbentuk bangunan seperti cotege dan memberikan ide-ide maupun gagasan. Untuk mengetahui seberapa besar bentuk partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan objek wisata alam air panas dan air terjun di Desa Mantikole dapat dilihat pada tabel wawancara sebagai berikut:

Tabel 2. Bentuk Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah di Objek Wisata

No	Pernyataan	Tukang Parkir	Penjaga Pintu masuk	Pedagang
1.	kehadiran partisipasi swasta dalam mengelola areal ini. Apakah sudah terlibat	- Belum, - menurut kami, perlu di ikutsertakan pihak swasta dalam pengelolaan, asalkan banyak mempekerjakan tenaga kerja lokal	- Belum, karena belum diajak	- Belum setuju
2.	Pernah kalian lihat di jalan-jalan papan promosi yang dipasang oleh pemerintah Kab. Sigi terkait dengan promosi areal wisata alam ini? Apakah ada promosi melalui radio dan TVRI Sul-Teng	- Ada, tidak terlalu jelas	- Belum jelas promosinya	- Belum tau
3.	Adakah aturan desa sebagai pedoman pengelola di areal wisata	- Berupa pesan tidak tertulis	- Himbaun	- Tidak Tau

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa bentuk partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dengan pemerintah dalam pengelolaan objek wisata air panas dan air terjun di Desa Mantikole sangat belum maksimal ini terlihat dari area wisata yang dimana secara keseluruhan belum penataannya belum teratur, adapun bentuk partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat yang berada di sekitar area wisata hanya sebagai pekerja seperti penjaga parkir, penjaga pintu masuk wisata dan sebagai pedangan makanan dan minuman.

4. Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Objek Wisata Alam Air Panas dan Air Terjun

Peran pemerintah desa Mantikole sebagai Fasilitator dan Regulator dalam

mengelola objek wisata alam di Desa Mantikole yakni sebagai Fasilitator dan regulator pemberi kebijakan dan pengambil keputusan; Sebagai tuan rumah yang baik bagi pengunjung, Sebagai penerima manfaat, dan Selaku penyedia dana dan pembuat perencanaan pembangunan destinasi wisata. Adapun peran pemerintah Desa Mantikole dalam pengelolaan objek wisata alam air panas dan air terjun dapat di lihat pada tabel di bawah ini sebagai berikut:

Tabel 3. Peran Pemerintah Desa Mantikole sebagai Fasilitator dan Regulator

No.	Peran Pemerintah	Informan Menjawab
1.	Selaku penyedia dana dan pembuat perencanaan pengembangan destinasi wisata	24

2.	Sebagai tuan rumah yang baik bagi pengunjung	22
3.	Sebagai pemberi kebijakan dan pengambil keputusan	17
4.	Sebagai penerima manfaat	13

Berdasarkan Tabel di atas bahwa pemerintah Desa Mantikole sebagai fasilitator dan regulator dalam pengelolaan objek wisata alam air panas dan air terjun sudah cukup baik akan tetapi peran pemerintah dalam memajukan wisata alam air panas dan air terjun harus secara optimal karena peran pemerintah saat ini hanya sebagai penyedia dana dan sebagai perencana dalam pengembangan.

5. Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Objek Wisata Alam Air Panas dan Air Terjun

Peran Masyarakat desa Mantikole terhadap pengelolaan objek wisata air panas dan air terjun di Desa Mantikole dikatakan tidak sepenuhnya berpartisipasi. Masih banyaknya masyarakat yang tidak menjaga dan merawat objek wisata air panas dan air terjun Mantikole. Partisipasi masyarakat pada pengelolaan objek wisata air panas dan air terjun terdapat dalam dua tahap pada tahap pertama yaitu tahap pelaksanaan. Ditahap pelaksanaan ini dibagi lagi menjadi dua yaitu masyarakat sebagai pengelola dan kegiatan usaha masyarakat. Pada tahap pengelola sebenarnya peran yang dilakukan masyarakat sudah cukup baik karena telah melibatkan sebagian masyarakat sebagai pengelola objek wisata, namun masih saja ada masyarakat yang mencoret-coret fasilitas-fasilitas objek wisata. Dikarenakan kurang sadar serta minimnya pengetahuan masyarakat tentang menjaga objek wisata air panas dan air terjun.

Pelaksanaan dilapangan pun masih banyak terdapat kendala-kendala yang datang dari masyarakat itu sendiri, masyarakat menganggap bahwa untuk menjaga dan merawat objek wisata merupakan tugas pemerintah, masyarakat tidak ingin bekerja secara cuma-cuma serta ingin mendapatkan keuntungan akan hal itu. Kegiatan usaha yang

dijalankan masyarakat selama ini pun tidak maksimal, karena sebagian yang berjualan hanya menjajakan makanan dan minuman.

6. Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Objek Wisata Alam Air Panas dan Air Terjun

Implementasi pengelolaan objek wisata alam air panas dan air terjun di desa Mantikole secara keseluruhan diwujudkan dalam bentuk fisik. Terutama pembangunan yang menyangkut masalah perbaikan dan pembangunan infrastruktur di area wisata air panas dan air terjun. Kesuksesan pembangunan fisik di area wisata air panas dan air terjun tidak lepas dari adanya partisipasi masyarakat dan pemerintah, dalam setiap tahapan-tahapannya. Kerja sama dan kesadaran yang tinggi merupakan dasar yang sangat fundamental terhadap kesuksesan suatu pengelolaan wisata. Pengelolaan objek wisata alam dengan prinsip pemberdayaan masyarakat harus dilandasi kerja sama yang erat dan kuat, baik antar sesama anggota masyarakat, masyarakat dengan pemerintah Desa maupun pemerintah daerah. Sebagaimana menurut Rahardjo dalam Mardijono (2008:19) mengemukakan partisipasi diartikan sebagai upaya peran serta masyarakat dalam suatu kegiatan baik dalam bentuk pernyataan maupun kegiatan. Lebih lanjut lagi partisipasi masyarakat ialah keikutsertaan masyarakat didalam program-program pembangunan. Adapun penjelasan di atas belum sesuai pengelolaan objek wisata air panas dan air terjun di Desa Mantikole, keikutsertaan masyarakat masih sangatlah minim ini terlihat dari tata cara pengelolaan yang bisa dikatakan belum teratur dengan baik.

7. Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Objek Wisata Alam Air Panas dan Air Terjun

Peran Pemerintah Kabupaten Sigi sebagai fasilitator dan regulator sepertinya belum berperan dengan baik, lancar tidaknya penyelenggaraan pariwisata tergantung dari

pihak pemerintah selaku fasilitator. Kedudukan pemerintah disini memfasilitasi semua orang yang berhubungan dengan kegiatan pariwisata, memberikan keterampilan dan tambahan ilmu pengetahuan bagi pengelolanya, menata lingkungan budaya dan lingkungan alam dilokasi wisata agar saling melengkapi antara satu dengan lainnya, mempromosikan ke daerah lain perusahaan yang banyak modal untuk memberi ruang kepada pihak swasta untuk berpartisipasi, meningkatkan keterampilan masyarakat dalam seni kerajinan, yang erat kaitannya dengan sumber daya alam.

Peran pemerintah desa Mantikole sebagai fasilitator dan regulator sudah maksimal. Meskipun demikian masih belum bersinergi dengan pemerintah kabupaten (dinas pariwisata dan kebudayaan). Jika lambat Dinas pariwisata memberikan pembinaan terhadap pengelola ekonomi kreatif di lokasi obyek wisata, seharusnya, kepala desa minta restu dari pak camat untuk melakukan terobosan mengikutsertakan warganya di balai latihan kerja untuk mengikuti kursus gratis, sesuai dengan bakat dan minat mereka sehingga pengembangan wisata serta ekonomi kreatif masyarakat pada obyek wisata berkembang sesuai harapan. Sedangkan fungsi pemerintah desa Mantikole sebagai regulator, sudah berfungsi secara maksimal karena sampai sekarang penyelenggaraan kegiatan wisata di desa Mantikole hingga sekarang masih tetap berjalan lancar.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Peran masyarakat dalam mengelola wisata alam (air panas dan air terjun di desa Mantikole Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi) adalah sebagai berikut:

1. Peran masyarakat dalam mengelola wisata alam melalui aspek Ekonomi, sosial, budaya, hukum, geografi masih belum maksimal, karena terkendala dengan

penataan yang belum teratur maksudnya belum ditata sesuai atraksi yang ada dilokasi wisata alam di desa Mantikole ini, jelas sangat berpengaruh dengan tata kelola dan hasil pengelolaannya.

2. Bentuk partisipasi masyarakat yang berada di sekitar area wisata alam air panas dan air terjun belum maksimal karena bentuk partisipasi masyarakat tersebut hanya sebagai pekerja di area wisata.
3. Peran pemerintah kabupaten Sigi sebagai fasilitator dan regulator belum terlaksana secara maksimal, masih perlu memusatkan perhatian di areal ini terutama untuk menyiapkan peraturan daerah terkait dengan pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan wisata di desa Mantikole. Peran pemerintah desa Mantikole sebagai fasilitator dan regulator sudah dilakukan secara Maksimal, namun karena terganjal dengan kesibukan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, kesempatan untuk menyusun peraturan daerah secara tertulis terkait dalam pelaksanaan pengelolaan di areal wisata, terabaikan.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat merekomendasikan Agar partisipasi masyarakat dalam mengelola wisata alam (air panas dan air terjun) di desa Mantikole berjalan maksimal dan efisien serta dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di lingkungan wisata, maka saran yang akan dikemukakan berhubungan dengan penelitian ini adalah:

1. Dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten Sigi proaktif melakukan koordinasi dan kerja sama beserta seluruh pihak yang terkait dengan pengelolaan wisata alam di desa Mantikole terutama dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pengelola agar menjalankan tugas pengelolaannya sesuai dengan keterampilan dan keahlian yang dimilikinya. Hal ini dilakukan untuk

mencapai tujuan meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat desa Mantikole.

2. Pemerintah kabupaten Sigi dan pemerintah desa mantikole bekerja sama dalam menerbitkan peraturan daerah sebagai pedoman utama dalam kelancaran pengelolaan pada obyek wisata alam di desa Mantikole, sehingga cara pengelolaan di areal ini tidak terkesan seadanya menurut kemauan para pengelola, tetapi ada aturan daerah yang menjadi payung hukumnya.
3. Kepada para pengelola sangat perlu melakukan peninjauan kembali terhadap penataan di areal wisata alam (air panas dan air terjun) di desa Mantikole, terutama penataan areal parkir, penataan tempat penjualan makanan dan suvenir jika ada, penatan setiap atraksi dan penggunaan kotek oleh para pengunjung, sehingga dapat terorganisir dengan baik dan dapat menaikan pendapatan pada obyek wisata.
4. Pemerintah bersama seluruh *stakeholder* yang terkait dalam pengelolaan destinasi wisata, proaktiflah dalam memberikan peluang kepada pihak swasta untuk bekerja sama dalam mengelola di areal wisata, agar pengelolaannya bergerak kearah industri pariwisata yang dikenal diseluruh pelosok sulawesi tengah atau negara Indonesia. Dan kepada pihak swasta tingkatkanlah kepercayaan terhadap pengelola di areal wisata, bilaperlu pihak swasta turut berpartisipasi dalam mempersiapkan tenaga pengelola yang handal agar terjadi kerja sama yang baik antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat dalam mengelola destinasi wisata, agar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan saling menguntungkan pada semua pihak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada tim pembimbing, Dr. H. Asep Mahpudz, M.Si. ketua pembimbing dan Dr. Samuel Sanda Patampang anggota pembimbing, yang memberi bimbingan dan arahan dari aspek

teoretis maupun praktis kepada peneliti guna penyelesaian artikel ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Fandeli, C. 2011. *Dasar-dasar Manajemen Kepariwisata Alam*. Yogyakarta: Liberty.
- Hadinoto, Kusudianto. 1996. *Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata*. Jakarta: UI Press.
- Paul B. Sherman dan Jhon A. Dikson. 1991. Van Nof Lindberg. 1989. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Pendit, I Nyoman, S. 1994. *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sunaryo, B. 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata*. Yogyakarta: Gava Media.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1995. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3S.